

DAFTAR PUSTAKA

- Alonso, S., Keane, J., & Merkel, W. (2011). *The future of representative democracy*. Cambridge University Press. The future of representative democracy
- Andyono, G., & et al. (2018). *THE ANALYSIS ON THE STAKEHOLDERS OF CONFLICT MITIGATION IN THE WAY KAMBAS NATIONAL PARK , LAMPUNG Faculty of Forestry , Universitas Gadjah Mada*. 15–28.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
<http://digilib.uinsgd.ac.id/11004/1/8>. Buku Kebijakan Publik.pdf
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (2019). *Kecamatan Sumowono Dalam Angka Tahun 2019*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.
- Berry, D. (1981). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Cahyana, S. R., & Nugroho, S. (2019). Analisis Peran Stakeholder Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7(2), 390. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2019.v07.i02.p25>
- Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 59–63.

<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2017>

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Desa Mendongan Kecamatan Sumowono. (2019). *Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Tahun 2019*.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang. (2019). *Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang Tahun 2019*.

Djam'an Satori, A. K. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta.
<http://scholar.google.com/scholar?cluster=5178894192441138210&hl=en&oi=scholar>

Edo, N. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Pratama Pionir Sentosa. *Agora*, 2(2), 10.

Fatimah, P. (2019). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI KABUPATEN WAJO. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Febrian, R. A. (2016). COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS (Review of the Draft and Regulation). *Wedana*, *II*, 200–208. <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824> diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB
- Fedora, S. D., & Hudiyono, R. F. (2019). Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) pada Unit Hubungan Masyarakat (Humas) dan Kesekretariatan PT Semen Padang. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, *2*(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v2i1.72>
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management UNDIP*, *6*(1), 1–13.
- Ibnu, S. (2008). *Sistem dan Prosedur Kerja*. Bumi Aksara.
- Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, *7*(4), 11.
- Iqbal, M. (2007). Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, *26*(3), 89–99.
- Irhamyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, 45–54.

Irwan. (2018). *PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRES PINRANG)*. UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.

John M, B. (2004). What to do when stakeholders matter: stakeholder identification and analysis techniques. *Public Management Review*.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719030410001675722>

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.

Kusumanegara, S. (2010). *Model dan aktor dalam proses kebijakan publik*. Gava Media.
<http://scholar.google.com/scholar?cluster=18349702075536173768&hl=en&oi=scholar>

Laporan Hasil Rekap Open Data BUMDes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). *Laporan Hasil Rekap Open Data BUMDes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019*.

Laporan Keuangan BUMDes Bersama Kabupaten Semarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang. (2019). *Laporan Keuangan BUMDes Bersama Kabupaten Semarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang*.

Liputan6.com. (2019). JK Tekankan Penting Pengentasan Kemiskinan dalam SDGs. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4081312/jk->

tekankan-penting-pengentasan-kemiskinan-dalam-sdgs

Lona, O. (2020, September 25). Ekonom: Pembangunan Ekonomi Desa Bisa Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Beritasatu.Com*.

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/680465/ekonom-pembangunan-ekonomi-desa-bisa-jadi-pendorong-pertumbuhan-ekonomi>

Manaf, A. (2016). Good Governance dan Pelayanan Publik. In *Modul Materi Good Governance dan Pelayanan Publik* (Vol. 1). <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-good-governance-aclc-kpk.pdf>

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. 4 (2015).

Miles, B. M. dan M. H. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*.

Modul Pelatihan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Publik. (2015). Modul Pelatihan Analis Kebijakan. *Pusaka Lembaga Administrasi Negara RI*, 11,12,15,54,186, 187,188.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.

MUHAMMAD. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Aceh* (M. A. P. Rudi Kurniawan, S.Sos., M. S. Bobby Rahman, S.Sos., & M. H. Hadi

Iskandar, SH. (eds.)). Unimal Press.

Murib, Y. (2021). *IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM MENINGKATKAN CITRA PERUSAHAAN OLEH EXTERNAL RELATION PT PERTAMINA MARKETING OPERATION REGION VIII MALUKU PAPUA DI JAYAPURA (studi pada perangkat PT Pertamina dan masyarakat penerima CSR kota Jayapura)*.

Nugroho. (2003). *Good Governance*. Mandar Maju.

Nugroho, R. (2014). *Publik Policy*. PT. Elex Media Komputindo.

Pahruraji, Arifin, J., & Suriyani, E. (2018). *ANALISIS PRINSIP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TAKULAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG (STUDI KASUS PADA USAHA VIDEO SYUTING)*. 1(2), 553–565.

Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, Pub. L. No. 59, 01 Universitas Nusantara PGRI Kediri 1 (2017). <http://www.albayan.ae>

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA, DAN PERINCIAN TUGAS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA, (2016).

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN
2012 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA, Pub. L. No. 7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010
Tentang Badan Usaha Milik Desa. (n.d.). *Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik
Desa.*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Profil Desa Mendongan Kecamatan Sumowono. (2019). *Profil Desa Mendongan
tahun 2019.*

Pujiana, T., Arianti, D., & Mutolib, A. (2019). Persepsi Stakeholder Terhadap
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Sungai Langka,
Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. *Mimbar Agribisnis:
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 5(2), 145.
<https://doi.org/10.25157/ma.v5i2.1905>

Rahim, E. I. (n.d.). *PARTISIPASI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK*.
55. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>

Safitri, F. A., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap
Pegelolaan Dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
yang Belum Berbadan Hukum (Studi Di Kabupaten Semarang). *Diponegoro
Law Review*, 5(2), 1–17. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

TINJAUAN

Salsabila, T. A., & Santoso, R. S. (2018). *Analisis Stakeholders (Aktor Kebijakan) Dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo Di Kabupaten Semarang*. 1–15.

Sigit Adrianto/Jawa Pos Radar Semarang. (2017). Kelola Sampah Jadi Bermanfaat. *JAWA POS RADAR SEMARANG*.
<https://radarsemarang.com/2017/12/10/124731/kelola-sampah-jadi-bermanfaat/>

Sofyani, H., & et al. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2002116>

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi (I)*. PUSTAKA PELAJAR.
<http://scholar.google.com/scholar?cluster=15994783831776943487&hl=en&oi=scholar>

Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/8411>

Suharsimi. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
<http://scholar.google.com/scholar?cluster=249234069641494238&hl=en&oi=scholar>

Suryana, M. S. (2010). *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif*

dan Kualitatif. UPI.

Suryati, Afrizal, & Nazaki. (2018). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2018. *Ilmu Pemerintahan.*, 1–17.

Suwitri, S. (2007). JEJARING KEBIJAKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir Dan Rob Pemerintah Kota Semarang. *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Second Edition (Print Version)*, VI(3), 1491–1494. <https://doi.org/10.1201/noe1420052756.ch304>

T. Keban, Y. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu* (3rd ed.). Gava Media. <http://scholar.google.com/scholar?cluster=18362607087458713024&hl=en&oi=scholar>

Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik : pendelegasian tanggungjawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan. In *Kebijakan Publik* (Issue 1993).

Terry, G. R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.

Thoha, M. (2003). *Perilaku organisasi konsep dasar dan aplikasinya*. <http://scholar.google.com/scholar?cluster=4239674500682587234&hl=en&oi=scholar>

Tokopedia.com/mendongan. (2020). *Toserba BUMDes Mitra Sejahtera Desa*

Mendongan. <https://www.tokopedia.com/mendongan>

Ulya, N. H. (2020). PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUKOREJO KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG. In *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* (Vol. 21, Issue 1). <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, (2019). <https://doi.org/10.31227/osf.io/dzuy7>

UNGERANNEWS.COM. (2020). *Pelatihan Tentang Bumdes di Boto Bancak: Optimalkan Perekonomian Desa*. <https://ungarannews.com/2020/12/16/pelatihan-tentang-bumdes-di-boto-bancak-optimalkan-perekonomian-desa/>

Uno, H. B. (2007). *Teori Motivasi & Pengukurannya*. P.T Bumi Aksara. <http://scholar.google.com/scholar?cluster=1720241372028331764&hl=en&oi=scholar>

UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan, Nepotisme. (n.d.). UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, 1*, 1–5.

Wakka, A. K. (2014). Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan

Tujuan Khusus (Khdtk) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.18330/jwallacea.2014.vol3iss1pp47-55>

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik : teori, proses, dan studi kasus*.

Wismayanti, K. W. D. (2016). *Strategi Pemerintah dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Tabanan Oleh*.

Yosevita, L. (2015). Implementasi Peran Stake Holder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agroforestri*, X(1), 21–30.

Yunardi, Y., Fauzi, A., & Mulatsih, S. (2019). Peranan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Berkelanjutan Bumdes Barokah Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 3(3), 189–199. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.3.189-199>